



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANTANI ALI, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan  
Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERZALDI ROSMAN  
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 15 November 2021

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG  
DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JANTANI ALI, ST  
PEMBINA TK. I  
Nip. 19731022 200501 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,38	(((Proporsi panjang Jaringan jalan dalam kondisi mantap) + (Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi) + (Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air) + (Persentase Penyediaan Air baku) + (Rasio Layanan Irigasi) + (Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang) + (Persentase Penyelesaian Sengketa tanah Garapan) + (Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah x 100) + (Persentase pelaksanaan penyelesaian ganti kerugan dan santunan tanah untuk pembangunan) + (Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum x 100) + (Jumlah Dokumen Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee x 100)) / 11) / 100
2	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,14	((Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara) + (Persentase Luas Kawasan yang Tertata) + (persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak) + (Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak) + (Persentase rumah akibat bencana yang tertangani) + (Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU))/6) / 100
3	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	80	Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)
4	Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Retribusi	500.000.000	Target Pendapatan Tahun 2021 (Rp)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	: Rp. 24.147.697.123,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	: Rp. 32.519.078.155,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	:	-
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	:	-
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	: Rp. 6.714.178.706,00	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	: Rp. 389.446.133,00	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	: Rp. 250.583.765.154,00	APBD, DAK, SMI
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	: Rp. 305.666.494,00	APBD
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	: Rp. 776.586.640,00	APBD
10.	Program Pengembangan Perumahan	: -	
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	: Rp. 2.654.672.652,00	APBD
12.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	: -	
13.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	: Rp. 65.427.119,00	APBD
14.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	: -	
15.	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	: -	
16.	Program Penatagunaan Tanah	: Rp. 230.738.390,00	APBD

Pangkalpinang, 15 November 2021

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



ERZALDI ROSMAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



JANTANI ALI, ST  
PEMBINA TK. I  
Nip. 19731022 200501 1 007